PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH

(Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

SKRIPSI

Nama : Nensy Septia Maulina
NIM : 222015247

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020

SKRIPSI

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH

(Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

Diajukan untuk menyusun skripsi

Pada program strata Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Palembang

Nama : Nensy Septia Maulina
NIM : 222015247

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
Nama	: Nensy Septia Maulina
NIM	: 222015247
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Sudi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Hj. Yuhanis Ladewi, S.E.,M.Si.,Ak.,CA	**Dr.H. Fadhil Yamaly, SE.,Ak.,MM**
NIDN/NBM : 0226016901/765380	**NIDN/NBM : 0217107002/1191648**

Mengetahui,
Dekan
U.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri, S.E.,AK.,M.Si.,CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nensy Septia maulina
NIM	: 222015247
Jurusan	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Judul	:Pengaruh *Good Corporate Covernance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah (Survei Pada OPD Provinsi Sumatera Selatan)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang yang telah dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karna karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan ini.

Palembang, 2019

Penulis

METERAI TEMPEL
BE68DAHF054896574
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nensy Septia Maulina

ABSTRAK

Nensy Septia Maulina/222015247/2019/Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Survei Pada OPD Sumatera Selatan/Akuntansi Sektor publik.

Rumusan dalam penelitian ini adalah Seberapa besar Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Sistem Pengendalian InternPemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Survei Pada OPD Sumatera Selatan. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Sistem Pengendalian InternPemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Survei Pada OPD Sumatera Selatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dan deskriftif. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner. Metode analisis dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dan teknik analisis deskriftif dan asosiatif dengan bantuan program Statistical Program Special Science (SPSS).

Hasil penelitian ini menunjukan Secara Parsial *Good Corporate Governance* berpengauh terhadap Kinerja Pemerintah, system Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah. Secara Simultan *Good Corporate Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kinerja Pemerintah

Abstract

Nensy Septia Maulina/222015247/2019/The Effect of Good Corporate Governance and Government Internal Control System on Government Performance Survey on South Sumatra OPD / Public Sector Accounting.

The formulation in this research was How Big influence of Good Corporate Governance and Government Internal Control System on Government Performance Survey in South Sumatra OPD. The aim was to determine the effect of Good Corporate Governance and Government Internal Control Systems on Government Performance survey in South Sumatra OPD.This research used associative and descriptive research types. The data used were primary and secondary data. Data collection technique used questionnaires. The analytical methods and data analysis techniques used in this research were descriptive and associative analysis methods and techniques by helped of the Statistical Program Special Science (SPSS) program. The result of this research indicated that partially Good Corporate Governance influenced Government Performance, the Internal Control system influences Government Performance. Simultaneously Good Corporate Governance and Government Internal Control Systems had a positive effect on Government Performance.

Keywords: Good Corporate Governance, Government Internal Control System and Government Performance

PENGESAHAN
NO. 579/Abstract/LB/UMP/08/2019
Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang motivator, junjungan umat islam, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah (Survai pada Organisasi Parangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)" Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi syarat mengikuti ujian komprehensif Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Berdasarkan Hasil pengujian Hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* Berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah maka pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja pemerintah dapat diterima karena adanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.. Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah, maka pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kinerja pemerintah dapat diterima, karena karena adanya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta Bapakku Saleh Lubis dan Ibuku Halimah yang telah mencintai dengan sepenuh hati, mendidik, membiayai, mendo'akan dan memberikan motivasi, kakakku Aldian Muziwansyah, Adik-Adikku Astriana Devita dan Eria Julita Sari dan seluruh keluarga besarku serta saudara seperjuangan yang dipertemukan karena Allah, yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan agar menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pemimbingku Ibu Dr. Hj. Yuhanis Ladewi, SE., M.Si., Ak., CA dan Bapak Dr. H. Fadhil Yamaly, SE.,Ak.,MM yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian menjadi lebih baik lagi. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam meyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE.,M.Si.,AK.,CA dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si selaku ketua Program studi dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, 2020

Penulis

Nensy Septia Maulin

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....**v**

HALAMAN PRAKATA..... **vi**

HALAMAN DAFTAR ISI.....**vii**

HALAMAN TABEL ..... **viii**

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN..... **ix**

ABSTRAK ..... **x**

ABSTRACT.....**xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori 11

1. *Good Corporate Governance* (GCG) 11

a. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) 11

b. Pengukuran *Good Corporate Governance* (GCG)…..13

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 16

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 16

b. Pengukuran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah…18

3. Kinerja Pemerintah.....22

a. Pengertian Kinerja Pemerintah……...22

b. Pengukuran Kinerja Pemerintah…….23

B. Kerangka Pemikiran.....26

C. Penelitian Sebelumnya……..30

D. Hipotesis……31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 35

B. Lokasi Penelitian.....35

C. Operasionalisasi Variabel 36

D. Populasi Dan Teknik Penarikan Sampel.....37

E. Data Yang Diperlukan 39

F. Teknik Pegumpulan Data.....40

G. Pengujian Data……...41

H. Analisis Data……..42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Responden.....48

2. Tingkat Pengembalian Kuesioner.....49

3. Hasil Pengujian Data.....51

4. Analisis Asosiatif 69

B. Pembahasan Hasil Penelitian 77

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan dan saran 90

DAFTAR PUSTAKA.....91

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah harus meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Di era demokrasi saat ini, masyarakat Indonesia dapat secara bebas berpendapat dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Namun kebebasan yang diberikan merupakan salah satu faktor pemicu masyarakat dalam menuntut pemerintah agar dapat bekerja dengan semestinya. Salah satu upaya pemerintah menghadapi berbagai tuntutan publik adalah dengan menjalankan visi dan misi pemerintahannya, serta berkomitmen yang tinggi guna mewujudkan cita-cita dan tujuan yang berbangsa bernegara, sebagai yang di amanatkan dalam pembukaan undang-undang 1945.

Kinerja berhasil atau tidaknya dipengaruhu oleh *good corporate governance* karena sebagai mekanisme pengendalian yang efektif menyelaraskan kepentingan kinerja daerah. Serta memberikan perlindugan kepada pemerintah. Ada dua prinsip utama dalam GCG. Pertama kejelasan hak untuk memperoleh informasi yang benar (akurat) dan tepat waktu. Iktikat pemerintah untuk melakukan pengungkapan (Cahyani: 2009).

Menurut Romney dan John Steinbart (2017: 198) kinerja berhasil atau tidaknya akan dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah untuk mencapai tujuan seperti perlindungan aset, menyimpan catatan secara terperinci, memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan,

menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang ditentukan dan mematuhi hokum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Hamdani (2016: 19) *good corporate governance* (GCG) turut membantu terciptanya hubungan yang kondusif, dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan pemegang saham). Hal tersebut menuntut adanya pertanggung jawaban manajemen kepada dewan komisaris kepada pemegang saham.

Good corporate governance adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (*stakeholder).* GCG memacu terbentuknya pola manajemen yang propesional, transparan, bersih dan berkelanjutan. Pedoman umum *good corporate governance* Indonesia tahun 2006 yang disusun oleh KNKG menyebut 5 asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (Cahyani: 2009).

Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang menyebar keseluruh aktivitas pengoperasian perusahaan, dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. Pengendalian internal memberikan jaminan memadai, jaminan menyeluruh yang sulit dicapai dan terlalu mahal. Selain itu sistem pengendalian intern memiliki keterbatasan yang melekat, seperti kelemahan terhadap kekeliruan dan kesalahan sederhana, pertimbangan dan pembuatan keputusan yang salah, pengesampingan manajemen, serta kolusi (Marshall Dan Paul, 2016 : 226).

Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhunya kebijakan pimpinan. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan nya yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengendalian intern berlaku untuk perusahaan yang mengelola informasi secara manual dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer (Indra, 2006: 458).

Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan, menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan menciptakan efisiensi dan efektivitas perusahaan (Yuhanis, 2017: 39). Terdapat berbagai karakteristik dalam sistem pengendalian intern yang dapat mempengaruhi kualitas suatu sistem informasi akuntansi, yaitu struktur organisasi yang memisahkan tugas dan tanggung jawab bagian secara tegas, pembagian tanggung jawab bagian dalam organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan bagian setiap organisasi, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya (Yuhanis, 2017: 41-42).

Kinerja Pemerintah Daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi (Chabib, 2013:3).

Menurut Rachmat (2010: 316) kinerja pemerintah adalah salah satu bentuk penilaian asas manfaat, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik.

Kegagalan implementasi tata kelola perusahaaan semakin memburuk, kondisi ekonomi Indonesia. Kegagalan penerapan tata kelola menjadi salah satu pemicu krisis keuangan dalam 10 tahun terakhir, perusahaan global pernah didenda ratusan juta dolar dari otoritas setempat karena buruknya penerapan tata kelola. Betapa pentingnya penerapan tata kelola secara baik dan berkelanjutan. Pasalnya hal ini dapat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, keseimbangan kerangka kerja, serta pemahaman menyeluruh dari manajemen perusahaan (Muliaman, 2014).

Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan *Good Governance* didalam negeri dianggap belum berjalan secara maksimal. Beberapa waktu lalu, ada sejumlah emite terkena masalah hukum. Missal ada AISA. Lalu belakangan ada lippo grup, di antaranya LPKR dan LPCK. Kedua emite ini dituding tidak menerapkan GCG dengan baik, lantaran diam-diam mengalihkan kepemilikan meikarta. Salah satu alasan menyebabkan GCG menjadi kurang baik karena adanya kepentingan tertentu (Irwan, 2018).

BPK soroti lemahnya sistem pengendalian intern kementrian/lembaga. Anggota BPK mengemukakan masalah saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP). BPK atas laporan keuangan kementrian lembaga (LKKL) tahun 2016 kepada 15 entitas pemeriksaan dilingkungan auditorat keuangan Negara (AKN). Hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan setidaknya 29 temuan signifikan yang disebabakan lemahnya sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Agung, 2017).

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada tahun 2017 memperoleh hasil sangat tidak memuaskan. Rendahnya nilai kematangan maturitas ini disebabkan tidak terdokumentasikannya setiap kegiatan. Tidak adanya dokumentasi menjadi masalah tersendiri ketika melakukan kegiatan pemeriksaan kesatuan perangkat kerja daerah (SKPD). Buruknya penilaian yang diperoleh ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan keterbatasan waktu sehingga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan (Siti, 2017).

Kinerja buruk, gubernur Sulawesi selatan pecat pejabat pemprov. Pemecatan ini dilakukan kerena dinilai tidak punya integritas, menghambat kinerja pemerintah dan kerap menghambat pembayaran upah tenaga kontrak seperti memotong upah (Nurdin, 2019).

Kinerja OPD kota Palembang menjadi sorotan anggota dewan, dikarnakan laporan komisi-komisi terkait rancangan peraturan daerah (raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBDP) tahun 2017, saat ini masih

ada program OPD pemerintah kota Palembang belum berjalan. Masih banyak OPD yang tidak memahami berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan didinas masing-masing dan masih banyak OPD yang tidak paham kegiatan yang telah dianggarkan dan dilaksanakan (Fauzi, 2017).

Kinerja OPD pemkot Palembang dianggap tidak maksimal, dalam rapat paripurna yang membahas laporan komisi-komisi terkait rancangan peraturan daerah (raperda), mengatakan saat ini masih ada program OPD yang tidak maksimal, contohnya dinas komunikasi dan informasi (kominfo) Palembang, sampai sekarang. Program smart city belum berjalan, padahal rancangan ini sudah ada sejak lama dan sudah masuk dalam anggaran (Fauzi, 2017).

Pemerintah kota Palembang belum menyelesaikan laporan keuangan tahun 2017. Sesuai peraturan, laporan keuangan pemerintah daerah harus diserahkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun angaran berakhir. Lambatnya penyerahan laporan keuangan ini disebabkan karena masih asa empat OPD yang belum menyelesaikan laporan keuangan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Pemukiman (Pera KP), Dinas Pendidikan (Disdik) Dan Dinas Kesehatan (Dinkes) (Harobin, 2018).

Tabel I.1

Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan Kelemahan SPI Atas LKPD Tahun 2016-2017

Permasalahan	**Jumlah permasalahan**	**Nilai (Miliar)**	**Pemerintah daerah**
Kelemahan SPI:	5		Provinsi Sumatera

Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan,			selatan
• Penyimpanan barang pada 4 OPD tidak didukung dengan kartu stok barang sehinggga persediaan yang dilaporkan pada akhir tahun hanya sesuai dengan hasil *stock opname* sisa persediaan yang ada . • Rekonsiliasi nilai asset tetap antara bidang asset dan bidang akuntansi badan pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKAD) tidak dilakukan • Penyertaan modal kepemilikan 100% tidak didukung dengan laporan keuangan sejak tahun 2014-2017			
Ketidakpatuhan terhadap perundung-undangan			
Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume atas pekerjaan pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp 4,40 miliar, dan pekerjaan pembangunan jembatan musi VI kota palembang senilai Rp 4,12 miliar	2	8,52 M	Provinsi Sumatera Selatan
Kekurangan volume atas paket pekerjaan fisik, antara lain pada pembangunan dan peningkatan jalan	-	5,07 M	Provinsi Sumatera Selatan
Kelebihan pembayaran yang terjadi pada pemkot ogan ilir, namun atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan yaitu: • Pembuatan trotoar jalan nasional dalam kota indralaya karena kekurangan volume dan pemahalan harga satuan kontrak	3	3,43 M	Provinsi Sumatera Selatan

addendum senilai Rp 1,85 miliar. • Pekerjaan urugan tanah untuk pembangunan taman kota dan Dinas PKP senilai Rp 1,18 miliar. • Pekerjaan rehap jalan pada Dinas PUPR dan revitalisasi pasar indralaya pada Dinas PKP senilai Rp.402,37 juta			

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2016-2017

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nur dan Ira (2014) menunjukkan bahwa Hasil analisis hipotesis menunjukkan baik, *good governance*, dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh pada kinerja pemerintah di kabupaten pelalawan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Febriana dan Aristanti (2017) Hasil penelitianmenunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan proksi PDRB per kapita, terdapat pengaruh yang signifikan dari *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi tingkat kemiskinan, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi rasio kemandirian, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB per kapita, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi tingkat kemiskinan, dan terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi rasio rasio kemandirian.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur (2018) Hasil penelitian ini menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah, sistem informasi

manajemen daerah dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeingian untuk meneliti lebih lanjut tentang "Pengaruh*Good Corporate Governance* dan Sistem Pengendalian InternPemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Survei Pada OPD Sumatera Selatan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah?
2. Seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui besar Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah?
2. Untuk mengetahui besar Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi:

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini bermanfaat menambah wawasan dan kemampuan berpikirmengenai penerapan teori yang telah didapat dari perkuliahan yang telah diterima dan dipraktekkan kedalam penelitian yang sebenarnya.

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

   Memberikan sumbangan referensi bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengambilan kebijakan kinerja pemerintah.

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan referensi bagian kajian mahasiswadosen untuk penulisan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Firman Sampurna, 2017. *BPK Soroti Lemahnya Sistem Pengeendalian Intern Kementrian/Lembaga.* Antaranews, Jakarta. Https://M.Antaranews.Com/Berita/631918/Bpk-Soroti-Lemahnya-Sistem-Pengendalian-Internal-Kementrianlembaga

Anwar Sanusi, 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Cetakan Kenam. Jakarta: Salemba Empat.

Cahyani Nuswandari, 2009. *Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan.* Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), Hal. 70-84 ISSN: 1412-3126.

Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission (COSO), 2013. Tentang *Sistem Pegendalian Intern Pemerintah.*

Fauzi Achmad, 2017. *Kinerja OPD Pemkot Palembang Dianggap Tidak Maksimal.* Palembangbaru.Com. Palembang. Http://Palembangbaru.Com/Kinerja-Opd-Pemkot-Palembang-Diangggap-Tidak-Maksimal/

Febriana Dan Aristanti, 2017. *Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislative Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia).* Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 9 (1), 2017, 173-186.

George H Bodnar Dan Wiliam S Hopwood, 2013. *Sistem Informasi Akuntansi.*Edisi 9. Penerbit Andi.

Hamdani, 2016. *Good Corporate Governance (Tinjauan Etika Dan Praktek Bisnis).* Jawabarat. Mitra Wacana Media.

Harobin Mustofa, 2018. *BPK Deadline Laporan Keuangan Pemkot Palembang.* Beritapagi.Com. Palembang. Http://Beritapagi.Co.Id/2018/01/22/Bpk-Deadline-Laporan-Keuangan-Pemkot-Palembang.Html

Hery, 2017. *Rahasia Pembagian Dividen & Tata Kelola Perusahaan.* Solo: TB. Rahma.

Indra Bastian, 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik.* Edisi 2. Salemba Empat.

Irwan Ariston Napitupulu, 2018. *Tata Kelola Sejumlah Emite Buruk Begini Kata Investor.* M.Kontan.Co.Id. Jakarta. Https://M.Kontan.Co.Id/News/Tata-Kelola-Sejumlah-Emite-Buruk-Begini-Kata-Investor-

Mahsun Mohamad, 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Marshall B. Romney Dan Paul John Steinbart, 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 14. Salemba Empat.

Mulyadi, 2016. *Sistem Akuntansi.* Jakarta. Salemba Empat.

Muliaman D Hadid Hadad, 2014. *Tata Kelola Perusahaan Buruk Jadi Pemicu Krisis Ekonomi Dunia.* Liputan6.Com, Jakarta. Https://Www.Liputan6.Com/Bisnis/Read/817550/Tata-Kelola-Perusahaan-Bu uk-Jadi-Pemicu-Krisis-Ekonomi-Dunia

Nur Azlina Dan Ira Amelia, 2014. *Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Interen Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan.* Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Vol. 12, No 2 Desember 2014

Nurdin Abdullah, 2019. *Kinerja Buruk Gubernur Sulawesi Selatan Pecat Pejabat Pemprov.* Regional.Kompas.Com, Jakarta. Http://Regional.Kompas.Com/Read/2019/04/22/19034721/Kinerja-Buruk-Gubernur-Sulawesi-Selatan-Pecat-Pejabat-Pemprov

Nur Jannah Abdul Aziz, Umi Pratiwi Dan Eko Suyono, 2018. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Manajerial Aparatur*

Pemerintah Daerah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Akuntansi. Vol. 20, No. 04 Tahun 2018

Peraturan Meneteri Negara Badan Usaha Milik Negara No: PER/01/MBU/2011 Tentang *Good Corporate Governance.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*

Rowan Jones Dan Maurices, 2016. *Public Sector Accounting*. Sixth Edition. Prentice Hall.

Syaiful Bahri (2018). *Metode Penelitian Bisnis Lengkap Dengan Teknik Pengelolaan Data SPSS.* Penerbit Andi (Anggota IKPAI). Cetakan CV Andi Offset

Siti Rosida, 2017. *Penendalian Intern Masih Buruk.* Jabarekspress.Com, Jakarta. Https://Jabarekspres.Com/2017/Pengendalian-Internal-Masih-Buruk/Amp/#Referrer=Https%3A%2F%2Fwww.Google.Com&Amp_Tf=Dari%20%251%24s

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Uma Sekaran, 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.

Widhu Putra, 2018. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Rajawali Pers.

Yuhanis Ladewi, 2017. *Sistem Informasi Akuntansi (Teori Dan Praktek).* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.